

**EVALUASI TERHADAP KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh:
Redion Bima Sakti Hernata Raysa
160810221

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

**EVALUASI TERHADAP KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
perolehan gelar Sarjana



Oleh:

Redion Bima Sakti Hermata Raysa
160810221

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2020**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Redion Bima Sakti Hernata Raysa
NPM : 160810221
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “SKRIPSI” yang saya buat dengan judul:

“EVALUASI TERHADAP KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BATAM”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil duplikasi dari karya orang lain. Sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan , serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 28 Juli 2020
Yang Menyatakan,



Redion Bima Sakti H.R.
160810221

**EVALUASI TERHADAP KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana

**Oleh:
Redion Bima Sakti Hernata Raysa
160810221**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 28 Juli 2020



**Neni Marlina Br. Purba, S.Pd., M.Ak.
Pembimbing**

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi kinerja pemungutan pajak bumi dan bangunan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kota Batam, populasi dalam penelitian ini ialah keseluruhan laporan pajak bumi dan bangunan periode 2016-2019 atau selama 48 bulan dengan jumlah 48 data. Dokumentasi dan penggunaan data sekunder yang diperoleh pada situs sie.penda.batam.go.id dan perolehan data yang langsung diperoleh dari kantor BPPRD Batam merupakan instrumen dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang diaplikasikan dalam penelitian ini dimulai pada uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji auto korelasi. Lalu dilanjutkan dengan penggunaan uji regresi linear berganda yang terdiri dari uji t atau uji parsial dan uji F atau uji simultan. Perhitungan analisis data diperoleh melalui bantuan aplikasi SPSS versi 25. Hasil uji parsial menunjukkan variabel kinerja pemungutan pajak bumi dan bangunan serta kontribusinya berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan hasil uji simultan, juga menunjukkan bahwa keseluruhan variabel secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Uji koefisien determinasi dalam penelitian ini memiliki hasil sebesar 0,719, yang berarti bahwa sebesar 72% pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini menyisakan sebesar 28% yang dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Kata kunci: Kinerja pemungutan, pajak bumi dan bangunan, pendapatan asli daerah

ABSTRACT

This study is aimed at evaluating the performance of land and building tax collection and its contribution to local own-source revenue in Batam City. The population in this study is the entire 2016-2019 land and building tax report or 48 months along with 48 datas. Documentation and the use of secondary data that obtained on the website sie.penda.go.id and the acquisition of data directly obtained from the BPPRD Batam office are the main instruments in this study. Data analysis techniques applied in this study began with the classic assumption test, which consisted of a normality test, a multicollinearity test, a heteroscedactivity test, and an auto correlation test. Then proceed with the use of multiple linear regression tests consisting of t test or partial test and F test or simultaneous test. Calculation of data analysis was obtained through the help of SPSS version 25. The partial test results showed that the variable performance of land and building tax collection and its contribution significantly affected the regional original income, and the results of the simultaneous test also showed that all variables simultaneously affected the regional original income. The coefficient of determination in this research has a result of 0.719, which means that 72% of the influence of the independent variables on the dependent variable. This leaves as much as 28% which is influenced or explained by other variables not included in this study.

Keywords: *Collection performance, land and building tax, local own revenue*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata (SI) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saranan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Putera Batam Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.kom., M.SI.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H
3. Ketua Program Studi Akuntansi Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI.
4. Ibu Neni Marlina Br. Purba, S.Pd., M.Ak. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan saran sampai selesainya Skripsi ini.
5. Bapak Mortigor Afrizal Purba, S.E.Ak., C.A. selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Putera Batam.
6. Segenap Dosen dan *Staff* Universitas Putera Batam.
7. Bapak Iskandar, SE. sebagai Kepala Badan KESBANGPOL Kota Batam Kabid Politik yang telah mneyetujui dan membantu dalam penyediaan data dalam penelitian ini.
8. Ibu Hanny Dewi Lestari, selaku orang tua penulis yang tidak pernah menyerah untuk percaya ke putranya yang akan sukses kelak, selalu menyemangati dan mendoakan kesuksesan dan kebahagiaan putranya.
9. Kepada Archi Ferdinata Alfa Rasya, sebagai saudara yang selalu mengalah, pengertian dan menjadi saudara terbaik yang dimiliki oleh penulis.

10. Eka Fitriyani, sebagai kunci keberhasilan dalam terselesaikannya penelitian ini berkat dorongan dan bantuannya yang tidak kenal lelah dan waktu.
11. Nindia Harnika Widati, kehadirannya yang merupakan anugrah dalam hidup dan senyumnya menjadi alasan utama penulis untuk selalu maju.
12. Teman-teman penulis yang saling memberikan dukungan hingga tersusunya penelitian ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan berkat serta Rahmat-Nya, Amin.

Batam, 28 Juli 2020



Redion Bima Sakti Hernata Raysa

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL	i
HALAMN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR RUMUS	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Teori Dasar Penelitian	9
2.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	9
2.3 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan	13
2.4 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	14
2.5 Penelitian Terdahulu.....	16
2.6 Kerangka berpikir	17
2.7 Hipotesis Penelitian	17
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1 Desain Penelitian	18
3.2 Definisi Operasional variabel.....	19
3.3 Populasi dan Sampel.....	21
3.4 Jenis dan Sumber Data	21
3.5 Teknik Pengumpulan Data	22
3.6 Teknik Analisis Data	22
3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Hasil Uji Penelitian.....	30

4.2	Pembahasan	38
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		42
5.1	Simpulan.....	42
5.2	Saran	43
DAFTAR PUSTAKA.....		44
LAMPIRAN 1		46
LAMPIRAN 2		85
LAMPIRAN 3		87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka berpikir.....	17
Gambar 3.1 Desain Penelitian.....	18
Gambar 4.1 Grafik Histogram.....	31
Gambar 4.2 Normal P-P Plot	32
Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedaksitas	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan realisasi pendapatan asli daerah Kota Batam.....	4
Tabel 1.2	Daftar target dan realisasi pajak bumi dan bangunan	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3.1	Indikator efektifitas	20
Tabel 3.2	Indikator kontribusi.....	20
Tabel 3.5	Jadwal Penelitian	29
Tabel 4.1	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	30
Tabel 4.2	Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	32
Tabel 4.3	Hasil Uji Multikonejaritas.....	33
Tabel 4.4	Hasil Uji Auto Korelasi	34
Tabel 4.5	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	35
Tabel 4.6	Hasil Uji Parsial.....	36
Tabel 4.7	Hasil Uji Simultan.....	37
Tabel 4.8	Hasil Uji Koefisien Determinasi	38

DAFTAR RUMUS

Rumus 3.1 Efektivitas	19
Rumus 3.2 Kontribusi	20
Rumus 3.3 Regresi Linear Berganda	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan dari Otonomi daerah telah semenjak dahulu dilakukan, ditandai pada era reformasi dengan adanya ratifikasi UU No. 22 di tahun 1999 yang mengatur tentang pemerintah daerah, juga UU No. 25 tahun 1999 yang mengatur tentang pembagian dalam maksud keseimbangan antara Keuangan Pusat dan Daerah. Diwarisi dari pernyataan oleh pemerintah kolonial "*Staatsblaad No. 329*" pada tahun 1903, yang memberikan kesempatan untuk membentuk unit pemerintah yang memiliki dan mengelola keuangan. Hal ini diperkuat oleh dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah] Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang pembagian dalam maksud keseimbangan antara keuangan pusat dan Pemerintah daerah. Keberadaan undang-undang ini diharapkan menjadi dasar percepatan dan pemerataan pertumbuhan dalam sektor ekonomi di daerah, yang selama ini terjadi ketidakseimbangan dalam pembangunan antara pusat dan daerah. (Safitri, 2016). dikarenakan salah satu pendapatan dalam suatu wilayah, yaitu pajak, dapat dikelola oleh wilayah itu sendiri.

Peran pajak dalam suatu kesatuan wilayah kenegaraan merupakan bagian yang sangat penting bagi keberlangsungan dari sistem kenegaraan tersebut, diluar sistem demokratis maupun otoriter, pajak tetap menjadi pendapatan utama bagi suatu negara. Pengelolaan pajak, baik dari segi penganggaran ataupun

pembelanjanya menjadi salah satu penentu kesejahteraan suatu negara. Peran pajak juga dapat merubah beberapa situasi, diantaranya, dapat mengurangi atau menekan kemampuan suatu individu ataupun perusahaan dalam menguasai ataupun memiliki hak atas sumber daya juga menguasai barang dan jasa serta menambah dapat menambah kepemilikan negara dari segi keuangan dan lebih mampu dalam menyediakan jasa ataupun barang untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan otonomi daerah, pajak di setiap daerah diberikan hak manajemen di setiap daerah dalam pengaturan dan pengelolaan daerah mereka sendiri sesuai hukum dan aturan yang berlaku. Membahas tentang pajak, pajak bumi dan bangunan diketahui sebagai salah satu penyumbang dari besarnya pendapatan asli daerah. Salah satu penyumbang pajak daerah ini sebelumnya diatur oleh pusat, yang dipungut melalui Dirjend Pajak. Dimulai dari tahun 2011 hasil pungutan pajak bumi dan bangunan sudah tak lagi bermuara ke pusat namun diserahkan ke Pemkot berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri atau PBKMD No. 213/PMK.07/2010, Nomor: 58 tahun 2010 yang berisi aturan terkait tahap-tahap persisapan untuk mengalihkan Pajak Bumi & bangunan yang sekarang difungsikan sebagai Pajak Daerah (Hasan, 2017) yang sebagian besar hasilnya akan diserahkan ke pemerintah daerah sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2007. Dana pajak digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, dan hal ini merupakan langkah besar yang cukup dinanti oleh daerah.

Dari uraian di atas, diketahui bahwa pajak berperan sangat vital dalam suatu pemerintahan, utamanya dalam sisi perkembangan daerah, juga termasuk kedalam pendapatan yang berpotensi untuk pendapatan asli daerah, karena jumlah

pendapatan pajak akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan penduduk, kondisi ekonomi dan stabilitas politik. Berbicara tentang pengembangan wilayah, pajak memainkan peran penting dalam pembangunan. Tantangan yang dihadapi daerah secara keseluruhan terkait dengan ekstraksi sumber pendapatan lokal, salah satunya adalah pajak tanah dan pajak konstruksi, yang merupakan komponen pendapatan daerah dari sumber sendiri, yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap total pendapatan daerah dan peluang perencanaan keuangan yang lemah dan juga pengawasannya. (Lutfiaazahra, 2015)

Hal tersebut juga terjadi di Kota Batam, yang memiliki wilayah pesisir dan lautan seluas 2.950 Km² atau 73,93% dari luas total 3.990 Km² (Batam Dalam Angka 2010), sebagai kota industri Melalui Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1973 (dirubah dengan Keppres No. 113/2000) dan area *free trade zone (FTZ)* serta memiliki letak yang strategis, membuat banyak warga dari luar Batam berdatangan lalu bertempat tinggal di dalamnya (Wisatago, 2015). Tentu terdapat potensi bahwa Batam akan dijadikan tempat tinggal tetap bagi pendatang tersebut dan secara langsung meningkatkan penerimaan PAD, salah satunya yaitu pajak bumi dan bangunan. namun realisasi penerimaan dari salah satu penyumbang PAD ini, di Kota Batam masih minim dalam konteks pencapaian target. Pada pertengahan 2018 realisasi pembayaran dari pajak tersebut baru mencapai 20,7 persen atau Rp 32,8 miliar, dibandingkan dengan target yang sebesar Rp 158,5 miliar. padahal pajak sangat dibutuhkan pemerintah daerah, khususnya dalam membiayai pembangunan. Berikut disajikan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam tahun 2016-2019.

Tabel 1.1 Target dan realisasi pendapatan asli daerah Kota Batam

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2016	909.266.681.460,69	881.275.469.153,50
2017	1.086.585.819.982,57	933.017.544.372,20
2018	1.235.027.230.923,76	1.069.769.196.982,99
2019	1.284.363.117.436,42	935.261.397.680,82

Terlihat pada tabel 1.1, bahwa tidak tercapainya target yang ditentukan terlihat pada realisasi di tahun 2016, begitu juga pada tahun 2017, terdapat perbedaan sebesar 153.568.275.610,37, diikuti dengan tahun 2018 dan tahun 2019. Ketidak tercapaian target terhadap realisasi berdasarkan apa yang tertera pada tabel mencapai titik terparah terjadi pada tahun 2019 yaitu mencapai selisih minus 349.101.719.755,60. Lalu berikut disajikan data pajak bumi dan bangunan dan realisasnya pada tahun 2016-2019 dikutip dari situs Siependa Kota Batam.

Tabel 1.2 Daftar target dan realisasi pajak bumi dan bangunan

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2016	107.706.468.401,00	108.724.913.762,00
2017	131.579.188.137,00	116.498.504.714,00
2018	158.583.296.894,00	154.966.293.108,00
2019	167.998.000.000,00	148.421.593.622,00

Terlihat pada tabel 1.2, tahun 2016 realisasi telah mencapai target, namun tidak dengan tahun 2017, terjadi kenaikan pada realisasi jika dibandingkan dengan 2016, sayangnya nilai tersebut tetap tidak memenuhi nilai yang sudah ditetapkan sebagai target pada tahun 2017 yaitu minus 15.080.683.423, diikuti oleh tahun 2018 yang juga tidak memenuhi target, namun perbedaan hanya sebesar 3.617.003.786,

hampir 5 kali lipat dari perbedaan antara realisasi dan target pada tahun 2017. Ketidaksampaian target pada realisasi juga terjadi pada tahun 2019 yang memiliki perbedaan sebesar 19.576.406.378, selisih tersebut merupakan selisih terbesar di 4 tahun terakhir. Walaupun perbedaan tidak terlalu besar, namun setiap tahun perbedaan antara target dan realisasi mengalami fluktuasi, menjadikan pencapaian target kurang efektif.

Beberapa hal yang menjadi kendala, yaitu lemahnya profesionalisme dan pelatihan yang dirasa kurang untuk karyawan Dispenda, dalam naungan perusahaan anti bangkrut, membuat pelatihan berikut profesionalisme di jadikan nomer sekian, yang mana hal utamanya adalah berada dan menjabat pekerjaan itu, juga kurangnya pengetahuan masyarakat akan prosedur dan cara kerja dari PBB yang dalam hal ini pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memasang reklame bersifat sugestif dan informatif untuk pembayaran pajak dalam setiap sudut kota ataupun lokasi tertentu, juga dokumen atau data yang bisa juga keliru, diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk Dispenda. (Simbolon, 2019). Dengan latar belakang yang telah disebutkan, serta beberapa penelitian sebelumnya, yaitu “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar” oleh Raudhatun Wardani, dan Penelitian “Analisis Kinerja Pemungutan Dan Retribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam” oleh Syahril Effendi dan Neni Marlina Br Purba, menjadikan penulis yakin untuk melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Terhadap Kinerja Pemungutan Pajak

Bumi dan Bangunan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Batam”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya target anggaran dari pendapatan asli daerah Kota Batam tahun 2016-2019
2. Tidak tercapainya target anggaran dari pajak bumi dan bangunan Kota Batam tahun 2016-2017
3. Rendahnya realisasi dari pajak bumi dan bangunan tahun 2016-2019
4. Kurang efektifnya pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Batam tahun 2016-2019

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah disebutkan, maka:

1. Karena keterbatasan waktu, maka data penelitian dipersempit menjadi 5 tahun terakhir
2. Tahun Penelitian dilakukan di tahun 2020, dan diharapkan selesai sebelum berakhirnya tahun. Penelitian juga akan dilakukan dengan data perbulan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi dan batasan masalah yang telah di paparkan sebelumnya, maka dapat di rumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam dari tahun 2016-2019 ?
2. Bagaimana kontribusi dari Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam dari tahun 2016-2019 ?
3. Bagaimana kinerja dan kontribusi dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam dari tahun 2016-2019 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam dari tahun 2016-2019
2. Untuk mengetahui kontribusi dari Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam dari tahun 2016-2019
3. Untuk mengetahui kinerja dan kontribusi dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam dari tahun 2016-2019 ?

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam bentuk teoritis maupun bentuk praktis, serta kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

1.6.1 Manfaat teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi penulis dan untuk pengembangan pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan maupun perbandingan dalam pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya penelitian di bidang perpajakan.

1.6.2 Manfaat praktis

Dalam manfaat praktis, manfaat penelitian ini adalah:

1. Penulis

Berguna untuk menambah wawasan dan mengetahui tentang Kinerja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Batam

2. Bagi Universitas Putera Batam

Hasil dari analisis akan bermanfaat untuk menjadi tambahan acuan pustaka untuk penelitian selanjutnya di Universitas Putera Batam

3. Bagi Pemerintah Kota Batam

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi sebagai pertimbangan untuk penilaian kinerja pemerintah, termasuk tingkat efisiensi dan efektivitas, serta kontribusinya sehingga pemerintah dapat menerapkan dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah di wilayah Batam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Penelitian

Informasi dari suatu lembaga yang dapat memperlihatkan kondisi keuangan dari suatu daerah dan yang mana fakta berupa data tersebut dapat digunakan sebagai gambaran akan kinerja suatu bagian dari pendapatan daerah dan tercantum dalam laporan keuangan daerah yang dapat diperoleh dan diakses oleh khalayak umum.

Memberikan informasi yang ingin mengetahui suatu kondisi sebuah perusahaan atau lembaga dari sudut pandang angka-angka atau keuangan adalah tujuan umum dari laporan keuangan (Fahmi., 2011). Dalam konteks penelitian ini, perusahaan yang dimaksud adalah suatu daerah atau kota dengan menghitung kinerja dan kontribusi dari salah satu bagian dari pendapatan utama suatu daerah.

2.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Inti dan asal muasal dari hukum yang mengatur PBB adalah UU No. 12 Tahun 1985, dan dirubah menjadi UU No. 12 Tahun 1994, dengan asas sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
2. Adanya kepastian hukum
3. Mudah dimengerti dan adil
4. Menghindari pajak berganda

Di dalam hukum, PBB adalah biaya yang diberikan pada pemegang kuasa, pemilik, penyewa, dan mereka yang mendapat keuntungan dari tanah dan bangunan tersebut. Memahami lebih dalam mengenai Bumi disini adalah tubuh Bumi di bawah dan di atas permukaan Bumi, yang meliputi daratan dan perairan daratan serta samudera wilayah Indonesia. Bangunan adalah susunan atau konstruksi yang ditanam atau ditempatkan secara permanen dan diaplikasikan sebagai tempat usaha di dalam wilayah negara Republik Indonesia. (Wibisono & Mulyani, 2019)

Berdasarkan UU No. 28/2009 tentang pembaruan pajak daerah dan retribusi, PBB yang sejauh ini termasuk ke pajak pusat, tetapi sekarang hampir semua pendapatannya diserahkan ke wilayah tersebut.

Objek PBB diuraikan pada Pasal 2 Ayat (1) UU PBB, yaitu tanah, hamparan atau muka bumi, termasuk perairan, atau dalam tanah. Lalu bangunan, yaitu susunan yang disusun sedemikian rupa dan dengan teknik tertentu hingga terkonstruksi menjadi suatu bangunan yang ada atau ditetapkan pada hamparan bumi atau muka bumi atau tanah juga perairan. sedangkan subjek PBB diuraikan pada Pasal 4 UU PBB yaitu individu atau entitas yang benar-benar memiliki hak atas penggunaan atau pendapatan manfaat dari bumi dan digunakan untuk kepentingannya, dan terbukti sedang atau dalam penguasaan hak atas bangunan.

Terdapat pembaharuan dalam PMK Nomor 208/PMK.07/2018, perbedaan yang ada dibandingkan dengan peraturan yang tercantum dalam Buku Pedoman Umum Pengelolaan PBB-P2 tahun 2014 silam tidak begitu signifikan. Perincian dan penambahan detail dilakukan untuk membantu penaksiran nilai NJOP bagi daerahnya.

Lebih dalam lagi, detail yang ditambahkan yaitu tata cara juga teknik penilaian NJOP, dikhususka dalam penentuan Zona Nilai Tanah atau ZNT berikut Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB). Anggapan seringkali terjadi kekeliruan dalam aspek ini, membuat pembaharuan dilakukan. (PRABANDARU, 2019)

2.2.1 Objek PBB

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang PBB, yang termasuk dalam objek pajak ini adalah Bumi dalam maksud tubuh Bumi di bawah dan di atas permukaan Bumi, yang meliputi daratan dan perairan daratan serta samudera wilayah Indonesia. Bangunan adalah susunan atau konstruksi yang ditanam atau ditempatkan secara permanen dan diaplikasikan sebagai tempat usaha di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 1 angka (2) Undang Undang PBB, diuraikan tentang konstruksi yang menjadi objek PBB adalah: Jalan lingkungan letaknya berada di dalam atau sekitar komplek atau kumpulan bangunan seperti penginapan, pabrik, dan sejenisnya, dan kesatuan lainya yaitu:

1. Kolam renang;
2. Pagar mewah;
3. Tempat olahraga;
4. Galangan kapal;
5. Dermaga;
6. Taman mewah;
7. Kilang minyak, air, dan gas;

8. Pipa minyak.

Objek PBB yang dibebaskan dari PBB Pasal 3 UU PBB yaitu objek yang:

1. Digunakan dalam tujuan kepentingan khalayak umum dan bukan untuk mendapatkan profit, objek bersifat non-profit dan lebih mengarah ke kemanusiaan atau amal seperti, bangunan ibadah, kesehatan, budaya, sosial dan lain lain;
2. Digunakan untuk tempat bersejarah, seperti memento prasejarah, pemakaman, peninggalan, keramat, dan lain lain;
3. Termasuk kawasan hutan yang dilindungi, atau terdapat flora yang terbukti hampir punah, hutan yang dipergunakan untuk kepentingan wisata, taman nasional, hamparan luas yang digunakan untuk mengembala dan diakuisisi oleh desa setempat dan tanah yang dimiliki oleh negara itu sendiri dan belum terbebani;
4. Digunakan oleh pihak perwakilan untuk kepentingan hubungan kenegaraan seperti konsultan atau untuk urusan diplomatik, dengan syarat negara tersebut juga melakukan hal yang sama;
5. Digunakan oleh perwakilan suatu perkumpulan atau organisasi bertaraf internasional yang telah disahkan dan ditentukan serta diizinkan oleh menteri keuangan;
6. Digunakan untuk urusan pemerintahan;

2.2.2 Subjek PBB

Subjek PBB berdasarkan pasal 4 Undang-Undang PBB adalah individu atau entitas yang benar-benar haknya dan kekuasaannya telah terbukti atas kepemilikan dari objek pajak bumi & bangunan yang sebelumnya telah diuraikan, subjeknya adalah:

1. Pemilik;
2. Pemegang kekuasaan;
3. Penyewa atau sebagainya.

2.3 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan

Kontribusi, Umumnya dapat diartikan sebagai peran dalam suatu hasil yang dilakukan secara bersama-sama, seperti contoh kecil, dalam pembuatan suatu makanan ringan, pengawet berperan penting dalam hal ini, menjadikan kontribusi yang diberikan oleh pengawet atas makanan ringan tadi cukup besar atau memberi kontribusi yang positif, namun dalam konteks perpajakan dapat diartikan sebagai andil yang dibuat oleh pajak bumi & bangunan atas keikutsertaannya dalam jumlah akhir dari pendapatan asli daerah. Kontribusi cukup familiar hubungannya dengan mata uang, ukuran kontribusi dari suatu hal biasanya digunakan oleh alat ukur tersebut, yang mana tentu kurang tepat untuk dijadikan patokan utama, kontribusi dapat berbentuk dalam hal lain, misalnya kegiatan yang berperan secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk pemikiran atau gagasan yang dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja, kepedulian tertentu sehingga menarik empati dan bentuk lain yang sekiranya dapat mensukseskan suatu perencanaan, dalam hal ini target dalam bentuk normatif yang sebelumnya telah ditentukan.

Seandainya pemerintah melakukan optimalisasi terkait pemungutan pajak bumi & bangunan ataupun kebijakan lain yang berhubungan dengan pajak bumi & bangunan, tentu pajak bumi & bangunan akan menjadi kontributor yang baik atas besarnya pendapatan asli daerah. (Murwanto & Budiarmo, 2012).

2.4 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan yang dihasilkan oleh suatu wilayah dan dikumpulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku merupakan pengertian dari variabel bebas ini. Pendapatan asli daerah didapatkan dari pemungutan pajak yang berada di wilayahnya, ataupun penmbudidayaan kekayaan alam yang berasal dari daerahnya juga pendapatan riil daerah lain, hal ini ditujukan untuk pemberian kebebasan kepada daerah untuk mengelola wilayahnya terkait dengan pendanaan sebagai bentuk dari asas desentralisasi (Budiarmo & Rooy, 2015)

2.4.1 Jenis Jenis Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan daerah yang diuraikan dalam UU No. 3 tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah, sebuah aturan dimana subjek atau individu yang terbebani pajak diharuskan untuk memberikan kontribusi dalam hal perpajakan atau finansial ke pemerintah tanpa diberikan timbal balik yang selaras dengan kontribusinya, aturan ini sudah ditegaskan dan dana uang dikumpulkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan di daerahnya,

2. Retribusi daerah adalah pembelian untuk pemberian izin atau suatu layanan yang diberikan kepada individu atau instansi tertentu yang secara khusus dimiliki oleh pemerintah.
3. Hasil dari pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, diantaranya penjualan saham atau dividen.
4. Lain-lain pendapatan yang sah meliputi:
 - a. Hasil penjualan dari point ke-tiga
 - b. Pendapatan dari Giro atau jasanya
 - c. Pendapatan berasal dari bunga
 - d. Pertukaran dari valuta atau mata uang negara lain
 - e. Komisi yang berasal dari potongan point tiga dan 4a.

2.4.2 Kendala Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Kehadiran kendala dalam suatu perencanaan dan kegiatan akan selalu hadir menemani dan turut andil dalam menghasilkan yang terbaik, memiliki sifat yang mandiri sangat diharapkan atas penerapan otonomi, berikut kendala yang ada:

1. Kebutuhan daerah yang cukup tinggi dibandingkan dengan pemasukan.
2. Layanan publik tersedia dengan baik berikut kualitasnya, namun masyarakat memberikan respon tidak positif menjadikan perkembangan terhambat.
3. Kurang kuatnya fasilitas dan infrastruktur yang disediakan.
4. Tidak cukupnya dana bantuan pemerintah dari pemerintah pusat.
5. Potensi maksimal dari pendapatan dan kondisi yang dilihat secara nyata tidak selaras. (Husin, Asni, & Sarita, 2017)

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan referensi dan berpegang pada penelitian terdahulu yang memiliki beberapa variabel yang sama, penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

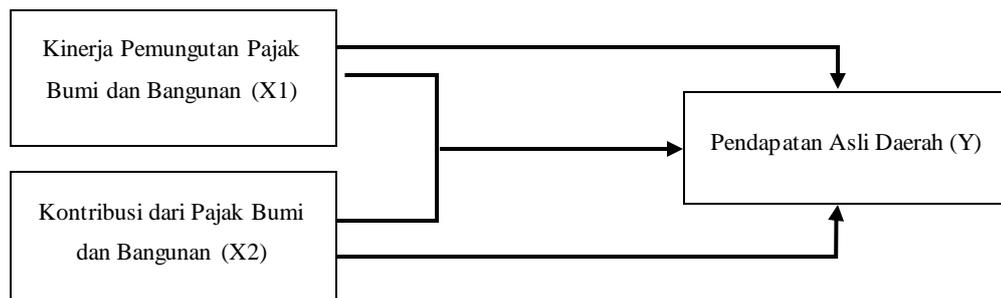
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	(Effendi & Br Purba, 2019)	Analisis Kinerja Pemungutan Dan Retribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam	Kinerja Pemungutan Pajak Reklame , Pungutan Retribusi Pajak Reklame dan Kinerja Pemungutan Pajak Reklame serta Pungutan Retribusi Pajak Reklame secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam.
2	(Yudita, 2015)	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Medan tahun 2013-2015	Pelaksanaan pemungutan pajak bumi bangunan sektor perkotaan di Kecamatan Medan Selayang belum terlaksana dengan baik.
3	(Sobri, 2016)	Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon Tahun 2014-2016	Terdapat pengaruh yang signifikan antara PBB terhadap PAD, dan Terdapat hubungan yang cukup kuat antara PBB terhadap PAD

2.6 Kerangka berpikir

Kerangka berpikir dapat diartikan sebagai bagan atau alur yang menjelaskan secara sederhana tentang bagaimana hubungan antar variabel.(Sekaran, 2011).

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka berpikir

2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir diatas hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

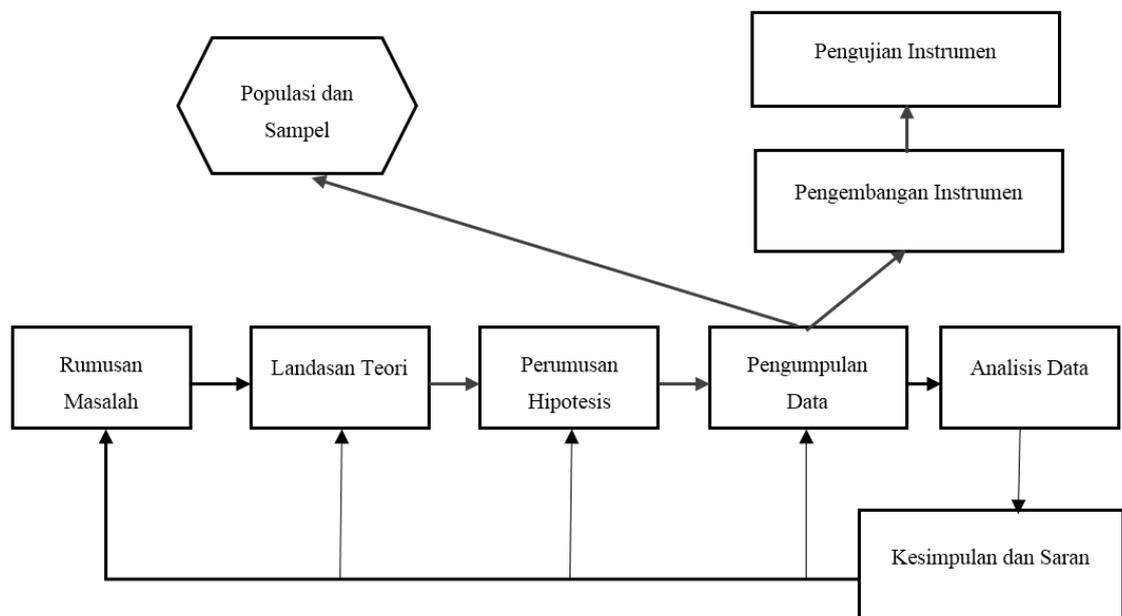
- H1 : Kinerja pemungutan pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah
- H2 : Pajak bumi dan bangunan berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
- H3 : Kinerja pemungutan pajak bumi dan bangunan dan kontribusi pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian seperti peta jalan bagi para peneliti untuk secara akurat membimbing dan menentukan arah program dari proses penelitian sesuai dan konsisten dengan tujuan penelitian. Dengan tidak menggunakan desain yang tepat, arah penelitian tidak akan jelas, dan para peneliti tidak dapat melakukan membuat penelitian sulit dilaksanakan dengan benar. (Sarwono, 2014)



Sumber: (Sugiyono, 2016a)

Gambar 3.1 Desain Penelitian

3.2 Definisi Operasional variabel

variabel operasional dalam lingkup objek yang diteliti, pembedaan akan operasi, pemahaman aktual dari variabel penelitian. Di sisi lain, operasionalisasi variabel adalah proses mendefinisikan variabel dengan kuat dan berkontribusi pada faktor-faktor yang diukur.

3.2.1 variabel Independent

variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kinerja Pajak Bumi dan Bangunan (X1) dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (X2)

1. Kinerja Pajak Bumi dan Bangunan

Kinerja diukur berdasarkan efektifitas dari suatu pekerjaan tertentu, efektifitas menggambarkan kisaran efek dan dampak (hasil) dari *output* untuk mencapai produk. Semakin besar output atau produk yang dihasilkan dalam menggapai hasil dan tujuan, semakin baik kinerja yang dilakukannya (Mardiasmo, 2018). Efektifitas disini digunakan sebagai tolak ukur kinerja, rumus yang digunakan dalam perhitungan ini ialah:

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Rumus 3.1 Efektivitas

Dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator efektifitas

Persentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
-75	Tidak Efektif

Sumber: (Mahmudi, 2010)

Efektifitas berpangku pada besarnya hasil dengan tenaga yang serendah mungkin, berbeda dengan efisien yang juga berpangku pada hasil dengan dana atau pengeluaran sekecil mungkin.

2. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam penelitian ini, kontribusi dimaksudkan sebagai besarnya peran yang diberikan oleh pajak bumi & bangunan dalam nilai akhir dari pendapatan daerah, Rumus yang digunakan dalam perhitungan kontribusi ialah:

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rumus 3.2 Kontribusi

Dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.2 Indikator kontribusi

Persentase (%)	Kriteria
>50	Sangat Baik
40.10-50	Baik
30.10-40	Cukup Baik
20.10-30	Sedang
10.10-20	Buruk
0.00-10	Sangat Buruk

Sumber : (Halim, 2012)

3.2.2 variabel *Dependent*

Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel terikat yang mana adalah PAD atau Pendapatan asli daerah (variabel Y)

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu PBB dan PAD di Kota Batam pada tahun 2016-2019, diperoleh pada situs siependa.batam.go.id, juga dari kantor BPPRD Batam dan termasuk dalam *time series*.

3.3.2 Sampel

Teknik sampling jenuh dipergunakan dalam penelitian ini dikarenakan sesuai dengan kriteria penelitian yang menggunakan seluruh anggota populasi, tentu dengan persyaratan bahwa anggota keseluruhan populasi tidaklah terlalu banyak atau dikatakan rendah. (Sugiyono, 2016b) dalam penelitian ini, akan diambil sampel atas keseluruhan laporan pajak bumi & bangunan dan pendapatan asli daerah di Kota Batam selama taun anggaran yang telah ditentukan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan hal yang ingin dicapai dalam penelitian, namun tanpa menggunakan data lain, data yang valid dan baru tidak akan terwujud dan akan selalu dalam ambang spekulasi. Penentuan standar data yang akan digunakan wajib dilakukan dalam penelitian (Sugiyono, 2016b) . Adapun sumber data pada penelitian ini ialah.

3.4.1 Jenis Data

1. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui data yang diambil di situs sipenda.batam.go.id, yang kemudian data akan ditelusuri dan diambil bagi yang bersangkutan pada penelitian terkait yang kemudian akan di verifikasi ke kantor dispenda Batam.

3.4.2 Sumber Data

1. Penelitian Keperpustakaan (*Library Research*)

Perolehan data yang bermuara pada artikel jurnal, buku atau sumber literasi lainnya dalam upaya perolehan data yang dinilai valid.

2. Penelitian Berbasis Internet (*Internet Research*)

Seiring dengan perkembangan jaman dan mudahnya akses akan ilmu pengetahuan melalui internet, penulis menggunakan referensi yang dapat digunakan dari internet.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

(*documentation*) Merupakan suatu pengumpulan data, pada hal ini yaitu berupa target dan realisasi pajak bumi dan bangunan serta pendapat asli daerah yang diperoleh dari kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam.

3.6 Teknik Analisis Data

Terdapat 2 cara dalam perolehan data terkait dalam penelitian ini yaitu: Penelitian melalui media pustaka atau *library research*, pembelajaran literasi

ditekankan dalam perolehan data. Dokumentasi dan penggunaan data sekunder yang diperoleh pada situs sie.penda.go.id dan perolehan data yang langsung diperoleh dari kantor BPPRD Batam merupakan instrumen dalam penelitian ini

Untuk hipotesis yang diajukan. Teknik analisis data untuk penelitian ini ialah:

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi dan akan digunakan untuk penggambaran data ketika data sudah sepenuhnya diperoleh. Analisis deskriptif adalah salah satu bentuk dari analisis uji generalisasi yang didasarkan oleh sampel. (Sugiyono, 2016a) analisis ini diuji dengan hasil dari hipotesis. Jika hipotesis (H_a) benar, atau tidak ditolak, maka penelitian ini memiliki hasil yang dapat digeneralisasi. analisis ini tidak mengambil bentuk suatu mutual dan komparasi.

Pada uji ini ditujukan untuk pengujian hipotesa dari para peneliti secara deskriptif. Hasil dari uji ini diputuskan oleh jenis data itu sendiri, yaitu berdasarkan skala pengukuran sebagai berikut: nominal, ordinal dan interval/rasio (Sugiyono, 2016b) dalam bentuk Mean (rata-rata), Maximum (tertinggi) dan Minimum (terendah)

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Digunakan dalam pengujian hubungan model regresi dengan hasil signifikan dan representatif.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel perancu atau intervensi memiliki distribusi normal dalam model regresi. dengan uji-t dan uji-F sebagai

dasar suatu nilai residu terdistribusi normal. Normalitas ditentukan juga oleh penyebaran data yang ditunjukkan pada tabel histogram, dengan keputusan:

- a. Jika pola dalam grafik histogram, memiliki pola yang normal, atau jika data mengikuti diagonal, maka dapat diasumsikan data ini terjadi normalitas
- b. Jika pola dalam grafik histogram, memiliki pola yang abnormal, atau jika data jauh bersebaran dari diagonal, maka dapat diasumsikan data ini terjadi abnormalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Tes multikolinieritas berguna untuk memeriksa model regresi terlepas dari apakah ada hubungan antara variabel. (Erlina, 2011). Satu model regresi disebut tidak terjadi korelasi atau tidak mengalami gejala multikolinearitas adalah jika pada uji tersebut memiliki hasil berupa nilai tolerance $> 0,10$ serta nilai VIF < 10 .

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk memastikan bahwa tidak adanya kesamaan varian residu pengamatan dari pengamatan lainnya, Model regresi yang memiliki nilai baik adalah model yang tidak terjadinya heteroskedastisitas (Suliyanto, 2011b). Dasar analisis terjadinya *heterocedasticity* adalah:

- a. Jika pola yang ditunjukkan beraturan atau tidak beraturan, mudah ditebak dan membentuk pola yang repetitif, maka *Heterocedasticity* telah terjadi.
- b. Jika pola yang ditunjukkan rancu atau berantakan, sulit ditebak dan membentuk pola yang random, maka *Heterocedasticity* terjadi.

4. Uji Auto Korelasi

Uji autokorelasi bermanfaat guna melihat pada model regresi, apakah terdapat hubungan antar variabel pengganggu di periode tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, apabila terdapat korelasi, maka akan disebut dengan problem autokorelasi, Jika model tersebut tidak mengalami gejala autokorelasi, maka model tersebut layak untuk dilanjutkan pengujian lainnya. Cara yang bisa dipakai guna mengetahui terjadinya autokorelasi yaitu dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW). Dengan hanya melihat tabel DW, data dapat diketahui atas dasar korelasinya. Model yang didapati tidak ada autokorelasi baik negatif atau positif menggunakan perbandingan sebesar 5% atau 0,05.(Arifin, 2017)

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah alat yang digunakan untuk memperkirakan besarnya permintaan di waktu yang akan datang didasari oleh data dari waktu lampau atau untuk menunjukkan besarnya pengaruh dari satu variabel bebas terhadap dua atau lebih variabel terikat. Tujuan dari implikasi metode ini ialah untuk meramalkan nilai dari variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas (Suliyanto, 2011a).

$$Y = \alpha + \beta_{1x1} + \beta_{2x2} + \beta_{3x3} \dots \beta_{n \times n}$$

Rumus 2.3 Regresi Linear Berganda

Keterangan :

Y = Probabilitas

α = Nilai Konstanta

$\beta_{1,2,3}$ = Nilai Koefisien Regresi

$X_{1,2,3}$ = variabel Independen

$\beta_n X_n$ = Nilai Koefisien Regresi dan variabel Independen ke-n

3.6.4 Uji Hipotesis

Uji Hipotesis digunakan menemukan jawaban atas dugaan yang telah dicantumkan dalam rumusan masalah penelitian.

1. Uji t (Parsial)

uji ini dilakukan dengan menguji satu persatu variabel bebas, yang digunakan dalam penentuan pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat lainnya. Dengan dasar penentuan, seperti membandingkan t hitung dengan t tabel, Jika probabilitas memiliki nilai kurang dari 0,05 artinya, variabel bebas, dalam hitung individu, kepada satu variabel terikat maka signifikansi terbukti pada nilai α 5%. Dan jika melewati nilai 0,05 maka signifikansi tidak terjadi.

jika nilai tabel lebih besar dari nilai hitung, hipotesis tidak dapat diterima begitu juga sebaliknya, jika t hitung besar dari t tabel, hipotesis dapat diterima.

2. Uji F (Simultan)

Pemeriksaan pengaruh atas seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat merupakan tujuan dari uji ini. terdapat beberapa cara dalam mendapatkan hasil uji ini, yaitu:

a. Rumuskan Hipotesis

efek simultan dimiliki oleh variabel bebas pada variabel terikat jika nilainya $H_0: b_1 = b_2 = 0$,

efek simultan tidak dimiliki oleh variabel bebas pada variabel terikat jika nilainya $H_a: b_1 \neq b_2 \neq 0$,

b. dengan persamaan 0,05, data dapat ditentukan tingkat kepercayaan yang

c. melalui perbandingan antara tabel F_{hitung} & F_{tabel}

1) Jika F_{hitung} rendah dari F_{tabel} , variabel bebas secara simultan tidak terdapat pengaruh pada variabel terikat.

2) Jika F_{hitung} tinggi dari F_{tabel} , variabel bebas secara simultan terdapat pengaruh pada variabel terikat..

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini memiliki tujuan utama untuk mengetahui dan menunjukkan ukuran dari jenis variabel bebas yang bisa mendeskripsikan jenis-jenis variabel terikat (Chandrarin, 2017). Nilai uji ini berkisar seperti angka biner, yaitu 1 (satu) dan 0 (no). Ketika angka 0 merupakan nilai dari R^2 , kemampuan dari variabel bebas tidak lah bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Namun, sebaliknya karena). Ketika angka 1 merupakan nilai dari R^2 , kemampuan dari variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat tidak terikat oleh batas, atau bebas yang diperlukan untuk meramal kemungkinan dari variabel bebas. R^2 sesuai namanya, ditujukan untuk menunjukkan koefisien determinasi. Dan hasil dari perhitungan ini di konversikan dalam format persen ($KD = R^2 \times 100\%$), hal ini memiliki arti seperti berapa besar kontribusi yang dapat ditunjukkan oleh variabel bebas dalam memengaruhi variabel terikat. (Arifin, 2017)

3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Sebelum penelitian ini dilakukan, penulis terlebih dahulu menentukan lokasi dan jadwal penelitian.

3.7.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian yaitu pada kantor DISPENDA Kota Batam yang beralamatkan Komplek Ruko Mitra Raya, blok F-18, Batam Center, Batam, Indonesia.

